

Ringkasan Eksekutif

Laporan Tentang Transparansi Pendapatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2008;

Projek Mempromosikan Transparansi Pendapatan, Transparency International

Dalam laporan ini, Transparency International (TI) melakukan evaluasi terhadap kebijakan, sistem manajemen dan performa dalam area-area yang relevan dengan transparansi pendapatan sektor hulu di 42 perusahaan minyak dan gas bumi terkemuka. Transparansi pendapatan dalam laporan ini meliputi tiga area kebijakan korporasi: pembayaran kepada pemerintah di mana perusahaan beraktifitas, operasi dan program anti korupsi perusahaan. Perusahaan-perusahaan di evaluasi di 21 negara lokasi operasi mereka. Laporan ini adalah produk utama dari Proyek Mempromosikan Transparansi Pendapatan (*Promoting Revenue Transparency Project, PRT Project*) TI dan berusaha untuk mendeskripsikan sejauh mana perusahaan-perusahaan yang dievaluasi dalam usaha menciptakan transparansi pendapatan, mengidentifikasi praktik unggulan (*best practices*), dan merekomendasikan sektor-sektor yang bisa ditingkatkan.

Temuan utama dari laporan ini adalah sebagian besar perusahaan yang dievaluasi tidak melaporkan pembayaran mereka ke negara tempat beroperasi secara lengkap. Sebagian kecil dari perusahaan yang dievaluasi melaporkan secara lengkap, sehingga membuktikan bahwa keterbukaan seperti itu dapat dilakukan.

Laporan ini dijiwai gerakan global memerangi fenomena “kutukan sumber daya” (*resource curse*). Kutukan sumber daya adalah fenomena yang terjadi apabila kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam (minyak dan gas bumi) gagal dikelola secara baik oleh pemerintah. Kegagalan tersebut menyebabkan kekayaan itu tidak menjadi berkat bagi kemaslahatan rakyat banyak, namun justru menjadi sumber kutukan berupa kegiatan pengumpul rente, korupsi, konflik, pelanggaran HAM dan kemiskinan.

Kualitas pengelolaan sumber daya alam ini adalah kunci untuk mengubah kutukan ini kembali menjadi berkat. Pendekatan yang penting terletak pada penguatan akuntabilitas pengambil keputusan yang mengontrol sumber daya ekstraktif dan pendapatan negara yang dihasilkannya. Namun akuntabilitas seperti itu tidak akan terwujud tanpa ada ketersediaan informasi tentang jumlah sumber daya yang diekstraksi, penerimaan yang dihasilkan, dan kemana penerimaan itu dialirkan. Sangat penting untuk mendapatkan informasi tersebut dari pihak perusahaan maupun pemerintah untuk memungkinkan dilakukannya pemeriksaan silang. Utamanya, transparansi penerimaan pemerintah merupakan langkah yang perlu diambil untuk penerimaan sumber daya demi pembangunan yang lebih baik dan juga perkembangan ekonomi yang berkesinambungan serta penerimaan yang terencana bagi perusahaan.

Meskipun laporan ini terfokus pada praktik pelaporan perusahaan minyak dan gas bumi, TI memahami bahwa perusahaan butuh beroperasi didalam suatu sistem regulasi milik pemerintah yang mendukung. Dalam konteks transparansi pendapatan, tanggungjawab tersebut dibagi antara pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah harus menjamin bahwa transparansi pendapatan tidak diabaikan. Konteks di mana perusahaan beroperasi, baik negara asal ataupun negara lokasi produksi, memainkan peranan penting untuk menentukan apa yang bisa dilakukan.

Laporan ini akan menunjukkan perbedaaan perusahaan yang performanya tinggi, sedang maupun rendah. Informasi ini bisa digunakan sebagai penekan bagi perusahaan saingan untuk menerapkan standar yang sama tinggi, yang pada akhirnya, menciptakan kondisi yang seimbang.

Sasaran dari proyek dan laporan ini adalah memberikan informasi yang akurat pada gerakan *multi-stakeholders*- termasuk di dalamnya perusahaan, penanam modal, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasikan transparansi penerimaan negara. Berbagai pemegang peran, terutama perusahaan sendiri, terlibat aktif dalam penyusunan disain riset dan dalam proses review data. Beberapa perusahaan menggunakan kesempatan untuk me-review data tentangnya dan memberikan umpan balik.

Perlu ditekankan bahwa laporan ini serta analisa dan rekomendasi di dalamnya disusun berdasarkan informasi dari perusahaan yang dapat diakses oleh publik. Juga perlu dicatat, bahwa meskipun menggunakan berbagai cara untuk melibatkan perusahaan dalam semua tahapan proyek ini, sangat disayangkan ada 30 perusahaan yang tidak menggunakan kesempatan untuk me-review data yang dikumpulkan.

Perusahaan-perusahaan yang dievaluasi dalam laporan ini dipilih berdasarkan relevansi mereka, persebaran geografis dan besarnya. Perusahaan ini bukan merupakan sampel yang representatif dari semua perusahaan minyak dan gas bumi.

Temuan-temuan Kunci

1. Transparansi pendapatan negara belum menjadi praktik yang lazim dalam industri ini. Dua per tiga dari perusahaan yang dievaluasi jatuh dalam peringkat menengah dan rendah di dalam performa transparansinya.
2. Ada variasi lebar dalam praktik yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan transparansi pendapatan. Beberapa perusahaan terkemuka dari antara International Oil Companies (IOC) dan National Oil Companies menunjukkan bahwa transparansi pendapatan mungkin dilakukan.
3. Praktik unggulan dalam transparansi pendapatan dimulai di rumah dengan adanya regulasi pemerintah yang mengatur praktik perusahaan dalam hal transparansi.
4. Pendekatan hukum menghasilkan dampak yang sistematis. Ada dua tipe regulasi yang saat ini bisa memberi perubahan kecil saja namun memiliki potensi:
 - a. Regulasi yang bisa berdampak pada banyak negara (*listing* dalam bursa saham)
 - b. Reformasi negara induk dengan mengikuti prinsip-prinsip Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI).
5. Keterbukaan informasi tentang pendapatan negara terhalang oleh adanya berbagai macam jenis format pelaporan yang sulit didapat, diinterpretasi dan dibandingkan antar perusahaan maupun negara.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan kunci diatas, laporan ini membuat beberapa rekomendasi berikut:

1. Perusahaan minyak dan gas bumi seharusnya melaporkan secara proaktif segala hal yang relevan dengan transparansi pendapatan negara
2. Negara induk (dari perusahaan migas internasional-red) dan agen pengaturan yang sesuai sebaiknya segera menerapkan pelaporan wajib untuk pendapatan negara untuk operasi mereka di dalam maupun di luar negeri.
3. Pemerintah dari negara produsen minyak dan gas bumi seharusnya segera menerapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mempublikasikan informasi yang relevan dengan transparansi penerimaan.
4. Agensi dan perusahaan pembuat peraturan harus memperbaiki aksesibilitas, dan kemampuan untuk diperbandingkan dari pelaporan tentang transparansi dengan mengadopsi standar pelaporan global yang seragam.

Daftar Perusahaan yang di Evaluasi dan Asal Negaranya

Perusahaan	Negara Asal
BG Group	Inggris
BHP Biliton	Australia
BP	Inggris
Chevron	Amerika Serikat
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)	Cina
China National Petroleum Corporation (CNPC)	Cina
ConocoPhillips	Amerika
Devon Energy	Amerika
Eni	Italia
ExxonMobil	Amerika
Gazprom	Rusia
GEPetrol	Guinea Tropis
Hess	Amerika
INPEX	Jepang
KazMunaiGaz (KMG)	Kazakhstan
Kuwait Petroleum Corporation (KPC)	Kuwait
Lukoil	Russia
Marathon Oil	Amerika
National Iranian Oil Company	Iran
Nigerian National Petroleum Company (NNPC)	Nigeria
Nexen	Kanada

Oil and Natural Petroleum Company (ONGC)	India
Pertamina	Indonesia
PetroChina	Cina
Petrobras	Brazil
Petro-Canada	Kanada
Petroleos de Venezuela (PDVSA)	Venezuela
Petronas	Malaysia
Qatar Petroleum	Qatar
Repsol YPF	Spanyol
Rosneft	Rusia
Saudi Aramco	Arab Saudi
Shell	Belanda
Sinopec	Cina
Societe Nationale des Petroles du Congo (SNPC)	Kongo Brazaville
Sonangol	Anggola
Sonatrach	Algeria
StatoilHydro	Norwegia
Talisman Energy	Kanada
Total	Perancis
Woodside	Australia